



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 23.A/PR/01.3-Kpt/5202/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS,
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan Renstra-Kementerian Lembaga memuat visi misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan bersifat indikatif, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 58/HK.03.1-Kpts/5202/KPU-Kab/V/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang menyatakan bagi Kementerian/Lembaga yang ingin melakukan penyusunan rencana strategis pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga ;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lombok Tengah perlu membuat definisi operasional indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan KPU Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020-2024 untuk memberikan arah kebijakan dan program sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Definisi Operasional Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan KPU Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-KPt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum Tahun 2020-2024
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : /PR/01.3-Kpt/5202/KPU-Kab/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG DEFINISI OPERASIONAL KINERJA SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN INDIKATOR KEGIATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020-2024

KESATU : Menetapkan Definisi Operasional Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan KPU Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 7 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

The image shows a circular official stamp of the KPU Kabupaten Lombok Tengah. The text inside the stamp reads "KABUPATEN LOMBOK TENGAH" and "KOMISI PEMILIHAN UMUM". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name "LALU DARMAWAN" is printed in blue capital letters.

LALU DARMAWAN

A. KAMUS INDIKATOR

1. KAMUS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

No	Indikator	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan	Sumber Data
1.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Pengukuran kumulatif dari informasi mengenai partai politik yang disusun secara mutakhir dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan dipublikasikan kepada masyarakat.	Publikasi Informasi Partai Politik / jumlah publikasi informasi * 100 %	prosentase pengelolaan dan Publikasi Informasi Partai Politik	Subbag Teknis
2.	Indeks Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Lombok Tengah dengan nilai “Baik”	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU kabupaten Lombok Tengah yang berkualitas	Pengukuran nominal dari Indeks Reformasi Birokrasi di tingkat kementerian/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam kemampuan mewujudkan reformasi birokrasi dalam institusi/lembaga.	Nilai Index Reformasi Birokrasi	penilaian internal KPU Kabupaten Lombok Tengah	penilaian mandiri satker
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Pengukuran nominal yang menggambarkan akuntabilitas kinerja institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Nilai akuntabilitas Kinerja	Nilai, Ukuran Keberhasilan Meningkatnya Nilai akuntabilitas kinerja KPU Kab. Lombok Tengah	LHE Inspektorat Wilayah III
4.	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU kabupaten Lombok Tengah	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Pengukuran nominal yang menggambarkan opini BPK atas kinerja laporan keuangan, transparansi laporan keuangan atau wajar tidaknya pengelolaan laporan keuangan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Opini BPK	Opini BPK, Ukuran Keberhasilan : peningkatan nilai opini BPK	BPK
5.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU kabupaten Lombok Tengah	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Pengukuran nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik dalam institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai keterbukaan Informasi Publik yang meningkat	KPID Provinsi NTB
6.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Jumlah Pengguna Hak Pilih / Jumlah DPT x 100 %	nilai prosentase pengguna hak pilih	Subbag Teknis
7.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	jumlah pemilih perempuan yang berpartisipasi / jumlah pemilih dalam DPT x 100 %	nilai prosentase pengguna hak pilih perempuan yang meningkat	Subbag Teknis
8.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	jumlah pemilih disabilitas yang berpartisipasi / jumlah pemilih dalam DPT x 100 %	nilai prosentase pengguna hak pilih perempuan yang meningkat	Subbag Teknis

No	Indikator	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan	Sumber Data
9.	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Daftar Pemilih Tetap Masuk dalam daftar pemilih	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	target DPTb - (realisasi DPTb - Target DPTb) / jumlah pemilih DPTb yang masuk dpt x 100%	rendahnya prosentase DPTB di kabupaten lombok tengah	Subbag Teknis
10.	Persentase KPU, Kabupaten Lombok tengah yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	Jumlah penyelenggaraan tahapan yang dilaksanakan sesuai jadwal / jumlah total tahapan Penyelenggaraan pemilu x 100%	meningkatnya tahapan jadwal yang terselenggara	laporan tahapan pemilu
11.	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan secara aman dan damai.	jumlah tahapan yang dilaksanakan dengan aman/jumlah seluruh tahapan pemilu x 100%	terselenggaranya penyelenggaraan aman dan damai di seluruh tahapan	laporan tahapan pemilu
12.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat keberhasilan KPU Provinsi/Kabupaten/Kotadalam menghadapi kasussengketa hukum	jumlah sengketa hukum yang menangkan / jumlah total sengketa / 100%	100 persen tanpa sengketa	laporan sengketa

2 KAMUS INDIKATOR KIENRJA PROGRAM

No	Indikator	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan	Sumber Data
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepiluan	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan operasionalisasinya	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat banyaknya fasilitasi dan kemampuan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam kerjasama dengan lembaga riset kepiluan	jumlah fasilitasi kereja sama KPU dengan lembaga riset / jumlah fasilitasi kerjasama x 100 %	mengingkatnya fasillitasi kerja sama dengan badan riset kepiluan	MOU dan PKS
	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di suatu institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	jumlah kesesuaian kompetensi Pegawai / jumlah standar kompetensi x 100 %	meningkatnya jumlah pegawai KPU yang berkompetensi sesuai dengan standar kompetensi penugasan	Daftar Nominatif Pegawai

No	Indikator	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan	Sumber Data
	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi / jumlah sarana dan prasarana x 100%	meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana	Aplikasi SIMAK
	- Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota -Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota -Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Pengukuran dalam satuan nilai sebagai tolak ukur akuntabilitas kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Pengukuran dalam satuan nilai dalam hal opini BPK atas laporan keuangan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Pengukuran dalam satuan nilai evaluasi dalam kaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi dan opini BPK	peningkatan nilai evaluasi dan opini BPK	hasil Reviu
	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat tingkat pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan	peningkatan progres pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan	Aplikasi SIDALIH
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI					
	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat tingkat pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	jumlah kecamatan yang terdistribusi tepat waktu,sasaran, tepat jenis / jumlah kecamatan	peningkatan prosentase jumlah kecamatan yang terdistriusi tepat waktu, jumlah, jenis	SILOG KPU
	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk mengukur tingkat kesesuaian penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan jadwal yang telah ditetapkan	Jumlah penyelenggaraan tahapan sesuai jadwal / jumlah seluruh tahapan jadwal x 100%	peningkatan prosentase penyelenggaraan tahapan sesuai jadwal	Laporan Pemilu/Pemilihan

3 KAMUS INDIKATOR KIENRJA KEGIATAN

No	Indikator	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan	Sumber Data
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
1	Pelaksanaan Perencanaan Organisasi					

No	Indikator	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan	Sumber Data
	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya Provinsi/Kabupaten/Kota dengan institusi yang berkaitan dengan upaya penguatan kelembagaan demokrasi	Jumlah total fasilitas kerjasama	Peningkatan jumlah fasilitas kerjasama KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	MOU dan PKS
	Jumlah revisi yang rencana kerja yang telah ditetapkan	Terwujudnya rencana KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Pengukuran dalam satuan revisi yang dilakukan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atas rencana kerja yang telah ditetapkan	Jumlah total revisi	Peningkatan jumlah revisi rencana kerja yang telah ditetapkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	website SATU DJA
	Persentase laporan yang akuntabel dan tepat waktu	Terwujudnya sistem penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Pengukuran dalam satuan banyaknya laporan monitoring dan evaluasi yang disusun secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan yang disusun tepat waktu / jumlah laporan x 100%	Peningkatan jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun	Laporan Monev
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat tingkat pencapaian target kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	jumlah target kinerja yang tercapai / jumlah target kinerja x 100	Meningkatnya pencapaian target kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan perjanjian kinerja	PK dan Realisasi
	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kemampuan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mencapai nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	Penilaian PAN - RB	Keberhasilan KPU Kabupaten Lombok Tengah meraih nilai minimal B	Penilaian LKE RB
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian					
	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumberdaya manusia	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Jumlah pegawai yang mendapat layanan / jumlah pegawai x 100%	jumlah/persentase pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Subag SDM, Daftar Nominatif Pegawai

No	Indikator	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan	Sumber Data
	Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	terlaksanya penegakan disiplin pegawai	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kefektifan penegakan disiplin pegawai	jumlah pegawai yang disiplin / jumlah pegawai x 100%	Peningkatan jumlah/persentase penegakan disiplin pegawai KPU Kab. Lombok Tengah	Laporan Penegakkan Disiplin Pegawai
	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	jumlah pegawai tercatat database / jumlah pegawai x 100%	Peningkatan jumlah/persentase pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	Simpeg KPU
	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat jumlah badan adhoc yang telah dipersiapkan dan dibentuk	Jumlah total badan adhoc	Meningkatnya jumlah badan Adhoc yang terbentuk dan dipersiapkan	Laporan penyelenggaraan seleksi badan adhoc
3 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan	jumlah penyelesaian Laporan pertanggungjawaban / jumlah total laporan X 100%	Meningkatnya jumlah /persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di lingkungan satker KPU kabupaten Lombok Tengah	Laporan Pertanggungjawaban laporan Keuangan
	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang telah diselesaikan secara tepat waktu KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah total laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan secara tepat waktu	Meningkatnya jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah	laporan akuntansi pelaporan keuangan
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang disusun dan disampaikan secara tepat waktu dan valid oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	jumlah laporan berbasis aplikasi / jumlah laporan x 100%	Meningkatnya jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang disampaikan secara tepat waktu dan valid oleh KPU kabupaten Lombok Tengah	laporan akuntansi pelaporan keuangan
	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Peraturan yang berlaku	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat ketertiban dan kepatuhan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	jumlah BMN yang dikelola / Jumlah BMN x 100 %	Meningkatnya kepatuhan dan ketertiban KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	SIMAK BMN

No	Indikator	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan	Sumber Data
4 Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
5	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker yang berfungsi dengan baik	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya sarana transportasi yang berfungsi dengan baik untuk menunjang kinerja Satker	jumlah alat transportasi yang baik / jumlah alat transportasi x 100 %	Meningkatnya jumlah/persentase sarana transportasi yang berfungsi dengan baik untuk mendukung kinerja Satker yang dimiliki KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Laporan sarana transportasi/ BA Transportasi
	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kemampuan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menanggulangi gangguan keamanan di wilayah atau lingkungan satker	jumlah		
6	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	jumlah rekomendasi yang terselesaikan / jumlah rekomendasi x 100%	Meningkatnya penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Lombok Tengah	rekomendasi BPK, APIP dan BPKP
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang diselesaikan / jumlah seluruh pengaduan x 100%	Meningkatnya jumlah/persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU kab. Lombok Tengah	Subbag Teknis
	Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat kedisiplinan atau ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	jumlah pengisian penyampaian kartu SPIP / jumlah kartu kendali SPIP x 100%	Meningkatnya kepatuhan dan kedisiplinan satker KPU Kabupaten/Kota yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali secara lengkap dan tepat waktu	kartu Kendali SPIP
	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Pengukuran dalam satuan nominal untuk nilai SAKIP KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang didapat dari Inspektorat	Nilai SAKIP KPU Kab. Lombok Tengah yang diperoleh dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.	Keberhasilan mendapatkan nilai baik dalam hal akuntabilitas kinerja	LHE SAKIP
	6 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan					

No	Indikator	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan	Sumber Data
	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan API yang ditindaklanjuti KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat / jumlah total pegawai x 100	Meningkatnya jumlah pegawai KPU Kab. Lombok Tengah lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu atau Program Studi Prioritas lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	Subbag SDM
	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat jumlah dokumen riset dan jurnal kepemiluan yang dimiliki oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	jumlah total riset dan litbang	Meningkatnya jumlah dokumen riset dan jurnal kepemiluan yang dimiliki dan dikelola oleh KPU Kab. Lombok Tengah	subbag Teknis
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI					
	1 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan					
	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan	jumlah pengelolaan JDIH yang didokumentasi / jumlah produk hukum x 100%	Meningkatnya jumlah/persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai aturan perundang-undangan oleh KPU Kab. Lombok Tengah	JDIH
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum					
	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat jumlah penurunan sengketa hukum yang dihadapi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam perkara perselisihan sengketa hukum	penyelesaian sengketa hukum di Bawaslu, TUN, MK / Jumlah sengketa hukum x 100 %	Menurunnya jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan hukum yang dihadapi oleh KPU Kab. Lombok Tengah	Subbag Hukum
	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	jumlah sengketa yang dimenangkan / jumlah sengketa x 100%	meningkatnya jumlah sengketa yang dimenangkan	subbag hukum
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW					

No	Indikator	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan	Sumber Data
	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas atau kesiapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	jumlah penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwalx100% Jumlah total jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki dan dikelola oleh Provinsi/Kabupaten/Kota	PKPU
	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas dan kesiapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data wilayah dan pemetaan/penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu tahun 2024	Jumlah data wilayah, pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu 2024 yang dimutakhirkan jumlah total data wilayah, pemetaan, penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu 2024	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase data wilayah, pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu 2024 oleh Provinsi/Kabupaten/Kota	Laporan DAPIL
	Persentase proses PAW Anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan kerja	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kesiapan dan kemampuan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan proses PAW anggota DPRD di tingkat Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dalam waktu 5 hari kerja	Proses PAW Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dapat selesai dalam waktu 5 hari100% jumlah Proses PAW Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase Proses PAW Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dapat diselesaikan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota dalam waktu 5 hari kerja	Laporan PAW
	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi (masih perlu didiskusikan biro teknis dan hupmas terkait bahasa indikator “difasilitasi”)	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya calon peserta Pemilu yang dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Calon peserta Pemilu yang dapat difasilitasix100% Jumlah total calon peserta Pemilu	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase Proses Calon peserta Pemilu yang dapat difasilitasi oleh Provinsi/Kabupaten/Kota	Daftar Calon Tetap
	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik, dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai tahapan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah total dokumen SOP, Pedoman atau petunjuk teknis verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai tahapan Pemilu/Pemilihan	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase Jumlah total dokumen SOP, Pedoman atau petunjuk teknis verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai tahapan Pemilu/Pemilihan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota	SOP

No	Indikator	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan	Sumber Data
	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang telah dimutakhirkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	jumlah data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang telah dimutakhirkanx100% jumlah data kepengurusan dan keanggotaan partai politik penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase jumlah data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang telah dimutakhirkan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota	Verifikasi Partai politik
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat					
	Provinsi/Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih (indikator ini sudah tidak lagi relevan dan perlu didiskusikan kembali oleh Biro Teknis dan Hupmas secara internal untuk indikator yang lebih relevan)	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pusat pendidikan pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	jumlah pusat pendidikan pemilih yang telah dibentuk oleh Provinsi/Kabupaten/Kotax100% jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase jumlah jumlah pusat pendidikan pemilih yang telah dibentuk oleh Provinsi/Kabupaten/Kota	RPP
	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) (indikator ini masih perlu didiskusikan kembali secara internal oleh Biro Teknis dan Hupmas) Perlu diskusi internal Biro Teknis dan Hupmas terkait penyusunan indikator yang berhubungan dengan RPP termasuk pertimbangan keterlibatan pihak ketiga dalam upaya melihat efektifitas pembentukan RPP di Provinsi, Kabupaten dan Kota	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya Rumah Pintar Pemilu milik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah dilengkapi digitalisasi RPP	jumlah Rumah Pintar Pemilu milik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah dilengkapi digitalisasi RPPx100% jumlah Rumah Pintar Pemilu	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase jumlah jumlah Rumah Pintar Pemilu milik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah dilengkapi digitalisasi RPP oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	RPP

No	Indikator	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan	Sumber Data
	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Pendidikan Pemilih Kepada MasyarakatUmum	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya sosialisasi dan pendidikan kepemiluan dan demokrasi yang diberikan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota kepada masyarakat umum	jumlah total kegiatan pendidikan kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum	umlah total kegiatan pendidikan kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase jumlah total kegiatan pendidikan kepemiluan dan demokrasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota kepada masyarakat umum	Laporan Sosialisasi
	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya permohonan informasi yang ditindaklanjuti PPID sesuai dengan SOP	jumlah tindakanlanjut permohonan informasi melalui PPID (sesuaidengan SOP)x100%jumlah tital permohonan informasi	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Nominatif Pemohon Informasi Publik (PPID)
	Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi/Kabupaten/Kota serta media massa.	Meningkatnya kualitasayanan informasi dandata yang cepat serta akurat	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya informasi dan publikasi non tahapan dan tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau medsos KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	jumlah informasi dan publikasi non tahapan dan tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau medsos KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan media massa jumlah total laman , media sosial KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Media massa	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase jumlah informasi dan publikasi non tahapan dan tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau medsos KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan media massa	PPID
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik					
	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan,pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistikPemilu/pemilihan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa menimbulkan masalah anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	Jumlah KPU yang dapat menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa menimbulkan masalah anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik.....x100% jumlah total KPU	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase Jumlah KPU yang dapat menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa menimbulkan masalah anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	Laporan Logistik Pemilu

No	Indikator	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan	Sumber Data
	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk mengukur kapabilitas, kemampuan atau kesigapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa menimbulkan kasus dalam pengadaan yang mengakibatkan kerugian atau pemborosan uang negara	Jumlah KPU yang dapat menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa menimbulkan masalah pengadaan logistik yang merugikan negarax100% jumlah total KPU	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase pengadaan logistik oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan negara	Laporan Logistik Pemilu
	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan dan kesigapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, jenis dan jumlah	Jumlah KPU mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, jenis dan jumlahx100% jumlah total KPU	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase Jumlah KPU mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, jenis dan jumlah oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Laporan Logistik Pemilu
	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan dan kesigapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	Jumlah KPU menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihanx100% jumlah total KPU	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase Jumlah KPU menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Laporan Logistik Pemilu
	Persentase penyediaan logistik Pemilu	Ketersediaan Logistik Pemilu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan dan kesigapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penyediaan logistik Pemilu/Pemilihan	Jumlah penyediaan logistik Pemilu dan atau Pemilihanx100% jumlah total KPU	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase Jumlah penyediaan logistik Pemilu dan atau Pemilihan yang dapat disediakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Laporan Logistik Pemilu
	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat ketersediaan suara pemilih hasil Pemilu/Pemilihan	Jumlah ketersediaan suara pemilih hasil Pemilu/Pemilihanx100% jumlah total pelaksanaan pemungutan sampai penetapan hasil Pemilu	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase ketersediaan suara pemilih hasil Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	DPT, Logistik

No	Indikator	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan	Sumber Data
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi					
	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan dan kesigapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan	Jumlah data yang dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.....x 100% jumlah total KPU	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Sidalih
	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat ketersediaan sarana, prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki dan dikelola KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar jumlah total sarana dan prasarana TI untuk sistem informasi KPU	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Laporan Sarana dan Prasarana



Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Lombok Tengah
 LALU DARMAWAN

